

Reputasi Perusahaan Melalui *Islamicity Performance Index* (IPI) Pada Lembaga Keuangan Syariah

Bachrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

bachrul.ulum@stisnq.ac.id

Abstract

The development of sharia financial institutions will be largely determined by the trust of their customers. This is because all financial institutions are required to respond to the reality that fund providers (shareholders and depositors) and other stakeholders have desires. If institutions do not meet their expectations, they will not be willing to provide funds or cooperate well. So Islamic financial institutions must work harder to build trust in their customers. This type of research is a normative approach through library research. The results of this research show that, first, Islamic financial institutions must build a good reputation in order to gain the trust of the wider community based on the identity and image of the institution. The two Islamicity performance index (IPI) can build a good reputation for sharia financial institutions with several indexes used, namely profit sharing ratio (PSR), Zakat Performance Ratio (ZPR), Equitable Distribution Ratio (EDR), Directors-Employee Welfare Ratio (DEWR), Islamic Income Ratio (IIcR) and Islamic Investment Ratio (IIvR).

Keywords: *Islamic financial institutions, company reputation, Islamicity performance index*

Abstrak

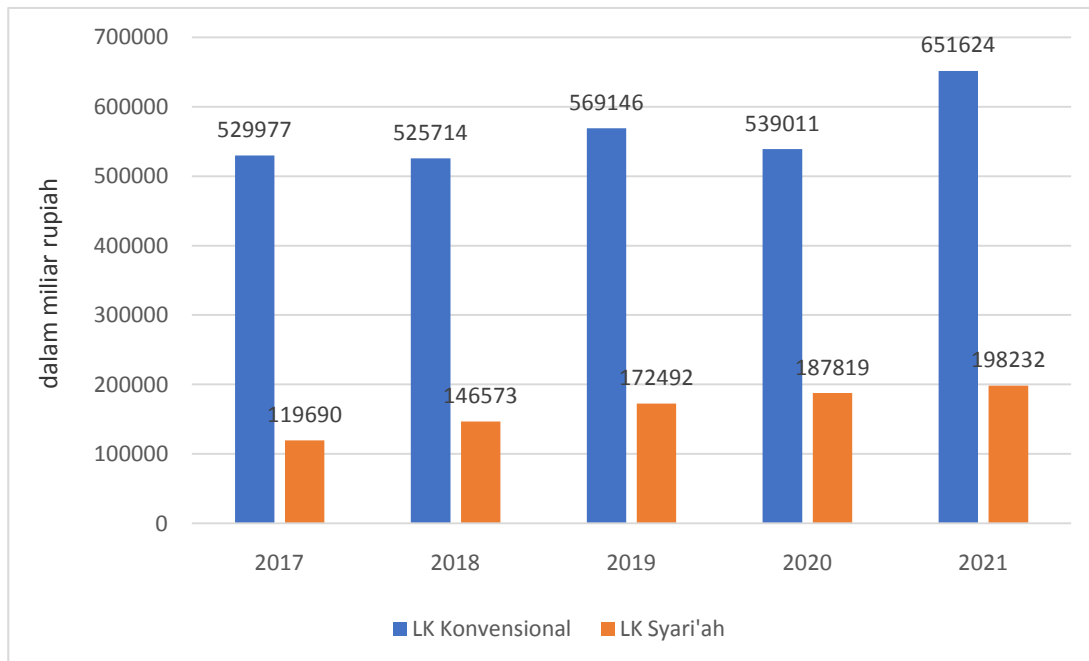
Berkembangnya lembaga keuangan syariah akan sangat ditentukan oleh kepercayaan para nasabahnya. Hal ini karena semua lembaga keuangan dituntut untuk merespon kenyataan bahwa penyedia dana (pemegang saham dan deposan) dan pemangku kepentingan lainnya memiliki keinginan. Jika lembaga tidak memenuhi harapan mereka, mereka tidak akan mau menyediakan dana atau bekerja sama dengan baik. Maka lembaga keuangan syariah harus bekerja lebih keras dalam membangun kepercayaan terhadap nasabahnya. Jenis penelitian ini adalah pendekatan normative melalui kajian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* lembaga keuangan syariah harus membangun reputasi yang baik agar supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara luas yang didasarkan pada identitas dan citra lembaga tersebut. *Kedua* *islamicity performance index* (IPI) dapat membangun reputasi yang baik terhadap lembaga keuangan syariah dengan beberapa indeks yang digunakan yakni profit sharing ratio (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), *Directors-Employee Welfare Ratio* (DEWR), *Islamic Income Ratio* (IIcR) dan *Islamic Investment Ratio* (IIvR).

Kata kunci : lembaga keuangan syariah, reputasi Perusahaan, *islamicity performance index*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan dengan bertambahnya aset, pembiayaan yang dijalankan, serta dana dari pihak ketiga. Meskipun yayasan keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat besar, namun mereka masih belum mampu menemukan perkembangan di lembaga keuangan

konvensional. Hal ini terjadi akibat asumsi masyarakat yang tidak berubah terhadap lembaga keuangan syariah, yang dipandang hanya sebagai label yang diterapkan untuk menarik minat masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut.



Gambar 2.4 Data Pemberian Kredit dan Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah (Sumber: OJK Desember 2021)

Jika dicermati bagan di atas, lembaga keuangan konvensional lebih banyak menyalurkan kredit terhadap masyarakat. Dengan demikian membuktikan bahwa masyarakat lebih berminat dan memilih lembaga keuangan konvensional daripada lembaga keuangan syariah. Dari data yang diperoleh melalui situs OJK, di tahun 2017 kredit dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 529.977 miliar lain halnya dengan lembaga keuangan syariah yang hanya menyalurkan sejumlah Rp. 119.690 miliar.

Di penghujung tahun 2021 lembaga keuangan konvensional masih tetap unggul dibandingkan dengan yang syariah, lembaga keuangan konvensional menyalurkan kredit sebesar Rp. 651.624 miliar sedangkan lembaga keuangan syariah memberikan kredit sebesar Rp. 198.232 miliar. Ini karena lembaga keuangan Islam memiliki margin yang lebih tinggi daripada lembaga keuangan konvensional dalam hal suku bunga pinjaman dan pembiayaan.

Melihat gambaran dari OJK tersebut, salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap barang dan jasa lembaga keuangan biasa dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah. Di awal pembentukannya, banyak pihak yang pesimis dengan terwujudnya penyatuan lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh para ekonom muslim. Dulu, lembaga keuangan dianggap tidak bisa digabungkan dengan prinsip syariah. Rasa ketidakpercayaan itu adalah gejala yang harus disikapi secara serius karena menyebabkan lembaga keuangan syariah kurang peminatnya dan sulit bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.

Disamping minimnya literasi masyarakat berkenaan dengan isu-isu seputar lembaga keuangan syariah, evaluasi dan pengendalian pada lembaga keuangan syariah kurang dipublikasikan secara intens kepada masyarakat umum. Penilaian akan kinerja lembaga keuangan syariah prinsip syariah (*sharia compliance*) sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai referensi dan pembuktian bahwa lembaga tersebut sudah menjalankannya dengan baik dan benar.

Betapa pentingnya penilaian kinerja lembaga keuangan syariah untuk tetap mempertahankan kepercayaan para *stake holders* akan kepentingan-kepentingan bisnisnya. Dengan tetap menjaga dan memelihara kepercayaan para pemangku kepentingan tersebut diharapkan akan menjadi factor utama meningkatnya nasabah yang bergabung supaya lembaga keuangan syariah menjadi jalan keluar permasalahan keuangan umat. Ini akan memiliki saran untuk memperkuat setiap klien Muslim dalam etika, keyakinan, syariah dan ukhuwah untuk pengakuan manfaat yang luas.

B. Landasan Teori

Reputasi Perusahaan

Penjelasan Dowling mengenai reputasi perusahaan adalah sebagai bentuk penilaian atau hasil evaluasi yang mencerminkan citra perusahaan dalam persepsi masyarakat. Oleh karenanya, reputasi adalah penilaian terhadap suatu organisasi yang di dalamnya terdapat produk hingga memunculkan *trust* di kalangan masyarakat. Di saat proses pengambilan keputusan bagi masyarakat, maka reputasi menjadi unsur utama yang layak dipertimbangkan.

Islamicity Performance Index

Shahul Hameed bin Mohamed Ibrahim dari Malaysia memperkenalkan *Islamicity Performance Index* untuk pertama kalinya. Seorang profesor dari universitas ternama di negara tetangga sedang mencari cara yang baik untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan Islam. Daftar Eksekusi Islami adalah perangkat untuk memperkirakan eksekusi yang dapat menunjukkan kualitas materialistis dan mendalam dalam yayasan moneter Islam. Petunjuk untuk mengukur kinerja dengan metode *Islamicity Execution List* harus dilihat dari laporan keuangan tahunan yang dapat diakses di berbagai halaman data milik yayasan.

Pengukuran kinerja dengan metode *Islamicity Performance Index* pada lembaga keuangan syariah dijelaskan dalam rasio keuangan berikut ini : profit sharing ratio (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), *Directors-Employee Welfare Ratio* (DEWR), *Islamic Income Ratio* (IIcR) dan *Islamic Investment Ratio* (IIvR).

C. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian normative melalui pendekatan kajian kepustakaan (*library research*) yakni mengumpulkan data dari sumber terkait sehingga diperoleh gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan menggunakan data-data dari beberapa dokumentasi yang dikumpulkan. Sedangkan data-data yang diperoleh adalah bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sumber-sumber lainnya.

D. Hasil dan Pembahasan

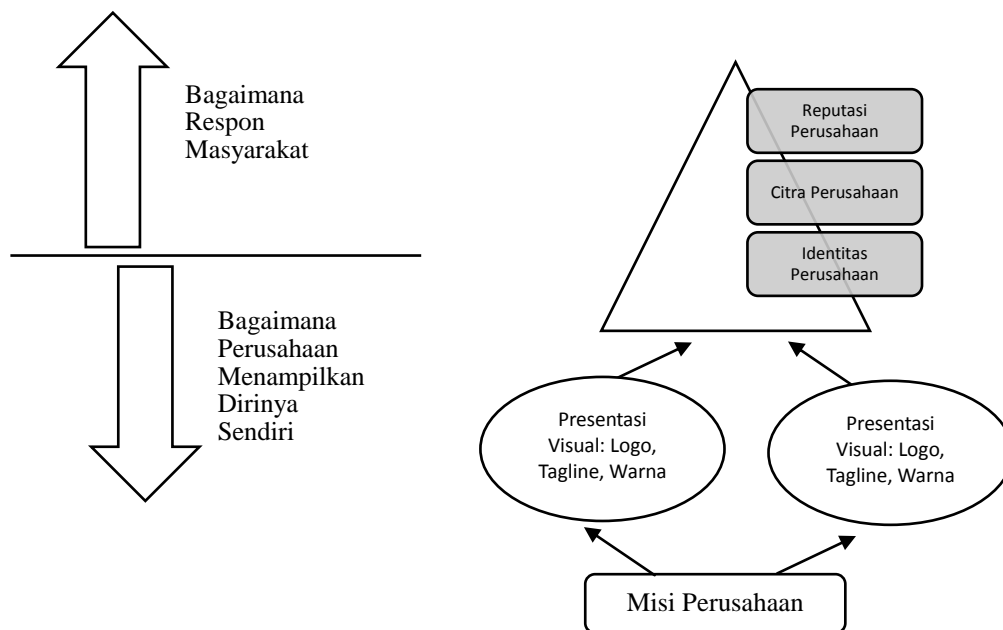
Membangun Reputasi Perusahaan

Salah satu unsur terpenting untuk membangun citra yang baik bagi perusahaan adalah memiliki reputasi yang baik. Namun demikian, reputasi yang baik akan berpengaruh positif dan memperkuat perusahaan saat dihadapkan dengan pesaing-pesaingnya. reputasi sebenarnya merupakan representasi pengetahuan konsumen terhadap produk, maupun pelayanan yang diterima dari perusahaan. Kredibilitas perusahaan akan ditentukan oleh reputasi yang baik, menjadikan konsumen lebih yakin akan memperoleh apa yang telah diusahakan

perusahaan. Reputasi seakan-akan sebagai jaminan bahwa konsumen mendapatkan sesuatu berdasarkan harapan yang dimiliki.

Reputasi suatu perusahaan tidak hanya berkaitan dengan produk dan jasa yang dihasilkan, akan tetapi segala hal yang berhubungan dengan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Reputasi perusahaan pada dasarnya adalah *reward* yang diperoleh perusahaan disebabkan adanya keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada perusahaan tersebut, yakni kemampuan perusahaan melakukan pelayanan terhadap konsumen sehingga perusahaan terus melakukan evaluasi dan mengembangkan kinerjanya untuk terus dapat memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi ekspektasi konsumen terhadap perusahaan tersebut.

Di bawah ini merupakan ilustrasi bahwa reputasi perusahaan bisa terwujud berdasarkan citra dan identitas perusahaan:



Gambar 1 Reputasi Perusahaan (menurut Westcott Alessandri)

Berdasarkan gambar 1 tersebut, dijelaskan bahwa Westcott dan Alessandri menggambarkan bagaimana rekam jejak perusahaan ikut berperan dalam hal hubungannya dengan misi, citra serta reputasi perusahaan. Dalam artian misi perusahaan dapat mempengaruhi identitas perusahaan, citra dapat mempengaruhi identitas perusahaan, dan citra akan membangun reputasi perusahaan, gagasan ini memberikan kesan bahwa identitas perusahaan merupakan aliran yang dilakukan dari bawah ke atas.

Menurut Trimannah, dalam kajiannya, ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2007 *Standing Foundation* (RI) telah mengembangkan alat ukur standar yang disebut RepTrack sebagai cara untuk menilai berbagai reputasi yang tergabung dalam suatu organisasi, dan sesekali mengarahkan studi ke masyarakat umum untuk mengetahui tentang kesan mereka terhadap beberapa organisasi paling terkenal di dunia.

RepTrack berharap orang-orang dapat menunjukkan perasaan mereka tentang sebuah perusahaan. Berikut adalah sebagian komponen kuncinya: (1) *Execution* (eksekusi); wawasan tentang hasil dan kemungkinan organisasi; (2) Tempat kerja (*workplace*); persepsi terhadap lingkungan kerja perusahaan dilihat dari kualitas karyawannya; 3) Identitas perusahaan; kesan nama organisasi, logo, slogan dan lain-lain yang berhubungan dengan kepribadian suatu organisasi.

Penjelasan Brown et al. menyatakan: Reputasi perusahaan adalah asosiasi mental dengan organisasi yang dilihat dan dipikirkan oleh sekelompok orang di luar organisasi, menurut definisi ini. Dari definisi di atas, upaya berwarna tanah untuk memahami status tersebut akan melihat pendapat mitra tentang asosiasi tersebut. Karena itu, Brown et al., mengenali kedudukan organisasi dengan kepribadian korporat dan gambaran korporat. Untuk kepentingannya, karakter diarahkan oleh hubungan psikologis pergaulan yang dimanfaatkan sebagai sumber perspektif individu dari pergaulan; Kepribadian menggambarkan identitas kita sebagai sebuah asosiasi.

Gambar tersebut dibagi menjadi dua hal yaitu gambar ideal (gambar yang diharapkan) dan gambar yang masuk akal (gambar yang ditafsirkan). Gambaran yang ideal adalah gambaran asosiasi, dan apa yang dibutuhkan asosiasi diakui sesuai dengan asumsi mitranya. Sementara anggota organisasi percaya bahwa citra yang digambarkan adalah cara mereka menampilkan diri kepada para pemangku kepentingan.

Sementara itu, menurut Trimannah, ketenaran itu unik dalam kaitannya dengan citra, juga tidak sama dengan merek. Berbeda dengan pembentukan, pemeliharaan, dan pertumbuhan citra atau merek, proses pengembangan reputasi membutuhkan waktu lebih lama. Pengetahuan dan berbagai potongan informasi adalah apa yang memberi seseorang citra mereka. Akibatnya, citra dan merek lebih rentan terhadap perubahan daripada reputasi.

Islamicity Performance Index (IPI)

Berkembangnya lembaga keuangan syariah akan sangat ditentukan oleh kepercayaan para nasabahnya. Hal ini karena semua lembaga keuangan dituntut untuk merespon kenyataan bahwa penyedia dana (pemegang saham dan deposan) dan pemangku kepentingan lainnya memiliki keinginan. Jika lembaga tidak memenuhi harapan mereka, mereka tidak akan mau menyediakan dana atau bekerja sama dengan baik.

Salah satu kesulitan utama organisasi moneter Islam adalah mendapatkan kepercayaan dari mitra untuk menyumbangkan modal mereka. Agar kepercayaan tersebut tetap terjaga maka diperlukan evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah. Evaluasi tersebut penting untuk dilakukan dikarenakan peran dan tanggung jawab lembaga keuangan syariah tidak hanya berkisar pada keuangan *stake holders* semata, namun yang paling urgen yakni bagaimana lembaga keuangan syariah mampu menjalankan bisnisnya dengan baik.

Dalam setiap transaksi, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa mereka mematuhi nilai-nilai syariah yang menjadi pedoman utama. Fondasi moneter Islam sebagai salah satu kerangka moneter Islam diletakkan untuk mencapai tujuan normal membuat keseimbangan sosial-keuangan (materi dan dunia lain) dan ekuitas bagi masyarakat untuk pengakuan falah (kepuasan di dunia ini dan di akhirat).

Pada tahun 2004, seorang akademisi Malaysia bernama Shahul Hameed berhasil mengembangkan dan mengukur kinerja dengan cara khas lembaga keuangan Islam. Metode alternatif untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah disajikan dalam artikel penelitiannya, *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*. Ada dua catatan yang dilakukan dalam estimasi ini, yakni Daftar Keislaman dan File Eksekusi Keislaman. File ini diharapkan dapat membantu mitra dalam menemukan bagaimana organisasi keuangan Islam bekerja sesuai standar syariah.

Bagi Hameed, *Islamicity Execution Record* merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk menilai kinerja lembaga keuangan syariah, baik dari segi dana, maupun standar kesusilaan, nilai, kehalalan dan kesucian yang diterapkan oleh yayasan keuangan syariah. Dengan cara ini, lembaga dapat

menunjukkan dan menjelaskan tanggung jawab sosial. Tingkat estimasi ini hanya melihat data yang terkandung dalam laporan moneter tahunan. Rasio kinerja zakat, rasio bagi hasil, rasio pemerataan, rasio investasi syariah, rasio pendapatan syariah, dan rasio kesejahteraan direktur-pegawai adalah contoh dari pengukuran ini.

Pengukuran kinerja dengan metode *Islamicity Performance Index* pada lembaga keuangan syariah dijelaskan dalam rasio keuangan berikut ini:

1. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Pengidentifikasi kinerja lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil daripada pembiayaan-pembiayaan lain adalah menggunakan *profit sharing ratio* (PSR). Karena bagi hasil merupakan cara untuk menghindari sistem bunga/riba yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional, maka lembaga keuangan syariah biasanya menawarkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Oleh sebab itu, ketika para *stake holders* ingin mengetahui keberhasilan pembiayaan bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah atas pencapaian eksistensinya adalah dengan menggunakan rasio ini. Keuntungan bagi hasil bisa dilihat dengan dua produk, yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. Bagi hasil dapat diketahui pada *islamicity performance index* (IPI) untuk melihat total pembiayaan transaksi di dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang terdapat pada lembaga keuangan syariah sebagai upaya untuk menerapkan prinsip utama pada lembaga tersebut.

Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat bagi hasil pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$

2. *Zakat Performance Ratio* (ZPR)

Sesuai dengan UU No. 1, sistem pengelolaan zakat Indonesia telah diatur, dilaksanakan, dan dijadikan model. 23 Tahun 2011. Dalam pedoman ini, perbankan syariah sebagai sebuah organisasi diharapkan untuk membayar zakat maal (sumber daya), khususnya zakat organisasi karena substansi yang sah dianggap oleh individu sehingga ada kebutuhan untuk membayar zakat karena ada komitmen kepada pemilik tanah. Satu lagi kerangka keuangan, tidak perlu komitmen untuk menyisihkan sebagian sumber dayanya untuk

orang lain sebagai cara untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk seperti pelit, dendam, nafsu, dll.

Organisasi yang tergolong membayar zakat adalah organisasi yang memiliki sumber daya (resources) yang bernilai uang, ada kecenderungan setiap orang ingin mengklaimnya, dan menjalankan pekerjaan di ranah halal.

Hameed, dkk masuk akal dalam eksplorasi mereka bahwa zakat adalah tujuan mendasar dari pembukuan syariah. Akibatnya zakat kemungkinan besar akan diperhitungkan dalam laporan keuangan tahunan di setiap lembaga keuangan Islam dan menjadi data berharga bagi umat Islam. Aset lembaga keuangan harus ditentukan dengan membandingkan aset bersih dengan laba bersih yang diterapkan secara konvensional.

Oleh karena itu, pembayaran zakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan juga akan tinggi jika kekayaan bersihnya semakin tinggi. Alat ukur kinerja zakat juga dapat dilakukan dengan *islamicity performance index* (IPI) yang memiliki tujuan mengetahui usaha dan kinerja lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban pembayaran zakat pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$ZPR = \frac{Zakat}{Net Assets}$$

3. *Equitable Distribution Ratio* (EDR)

Equitable Distribution Ratio (EDR) adalah rasio yang digunakan untuk menentukan proporsi pendapatan kotor yang diungkapkan dan dibagikan kepada pemangku kepentingan untuk kepentingan qardh dan infak, hak pemegang saham, pendapatan bersih, dan lain sebagainya. Di setiap bidang yang disebutkan di atas, dievaluasi dengan memperkirakan distribusi dari jumlah yang telah diberikan (kepada seluruh penduduk, perwakilan, pendukung keuangan dan organisasi) dibagi dengan gaji mutlak setelah dikurangi biaya dan kewajiban zakat (pengembalian nilai/ROE). Dari estimasi absolut dengan menggunakan proporsi ini, dapat dilihat berapa banyak dispersi gaji kepada orang-orang pada umumnya, pendukung keuangan, organisasi dan perwakilan.

Tingkat pemerataan dan pemerataan rasio ini dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. *Qardh* dan Donasi (QD)

$$QD = \frac{Qardh+Donasi}{Income-(Zakat+Taxes)}$$

b. *Employees Expense* (EE)

$$EE = \frac{Employee Expense}{Income-(Zakat+Taxes)}$$

c. *Share Holders* (SH)

$$SH = \frac{Dividend}{Income-(Zakat+Taxes)}$$

d. *Net Profit* (NP)

$$NP = \frac{Net Profit}{Income-(Zakat+Taxes)}$$

4. *Directors-Employee Welfare Ratio* (DEWR)

Dalam ajaran Islam mempunyai sikap yang adil dan mampu menegakkan keadilan adalah sebuah cerminan perilaku yang harus diterapkan bagi umat muslim. Setiap muslim harus bersikap adil di setiap tingkah lakunya dalam kondisi apapun dan terhadap siapapun serta menghindari berbuat kebatilan yang akan mengakibatkan sikap dhalim pada orang lain. Di setiap struktur organisasi akan selalu ada orang yang berposisi sebagai atasan (manager, direktur, dll.) dan bawahan (staff, karyawan, dll.). Kadang kala ada masalah internal yang dihadapi oleh suatu perusahaan di setiap kebijakan yang dikeluarkan, di antaranya adalah pemberian gaji yang sangat besar kepada direktur terhadap pekerjaan yang ia lakukan.

Remunerasi bagi atasan atau pimpinan di lembaga keuangan syariah adalah hal yang sangat strategis dan urgen untuk mengukur standart penilaian yang baik terhadap manajemen suatu perusahaan. karena biasanya perusahaan akan memiliki kebijakan untuk membayar gaji pimpinan perusahaan yang sangat tinggi untuk membantu mereka mencapai visi dan tujuan yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan (pemegang saham).

Rasio ini akan memaparkan tentang kesejahteraan hidup antara atasan dan bawahan. Penerapan rasio ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesejahteraan keuangan atasan sebanding dengan kesejahteraan bawahannya. Gaji, biaya pelatihan, tunjangan, dan aspek kesejahteraan karyawan lainnya sudah termasuk. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan direktur dan karyawan pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$DEWR = \frac{Remunerasi Direksi}{Kesejahteraan Karyawan}$$

5. *Islamic Income Ratio (IIcR)*

Jumlah uang yang dihasilkan bisnis dari sumber halal akan diukur menggunakan rasio waktu ini. Organisasi moneter Islam harus mengambil keuntungan dari sumber yang diperbolehkan dalam Islam (sumber halal). Dalam hal organisasi moneter Islam mengambil keuntungan dari sumber yang tidak halal, maka harus dimaknai sebagai bahan data bagi masyarakat secara umum, misalnya jumlah, sumber, penetapan, dan yang paling penting, metode yang digunakan untuk mencegah masuknya transaksi lembaga keuangan Islam.

Proporsi ini akan menjadi alat estimasi bagi suatu organisasi untuk mengetahui gaji yang diperoleh dari sumber halal. Nilai yang didapat adalah mengukur tingkat kehalalan dan kemajuan dalam memahami standar dasar keuangan Islam, khususnya menghindari riba sambil memperoleh upah. Persamaan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat upah Islam pada proporsi ini adalah sebagai berikut:

$$\text{IIcR} = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non Islamic Income}}$$

6. *Islamic Investment Ratio (IIvR)*

Investasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yang diperbolehkan dalam islam. karena setiap harta yang dimiliki berpotensi dikenai kewajiban pembayaran zakat apabila didiamkan, maka cepat atau lambat harta tersebut akan habis karena dikenai nilai zakat. Sehingga dalam hal ini setiap muslim diperkenankan untuk mengembangkan hartanya dalam bentuk investasi yang diatur secara islami agar menjadi investasi yang halal.

Dalam ajaran Islam, investasi dapat mendorong meningkatkan perekonomian secara signifikan. Dalam artian akan meningkatkan daya jual-beli (*al-bay'*), simpan-pinjam (*iarah*), sewa menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*) ataupun berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Hal ini juga akan membedakan asset harta kekayaan yang dimiliki supaya mampu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dari sejumlah elemen kelompok social lainnya. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat investasi islam pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{IIvR} = \frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic Investment} + \text{Non Islamic Investment}}$$

E. Kesimpulan

1. Dalam membangun kepercayaan pada lembaga keuangan syariah maka perlu dibentuk reputasi yang baik supaya memperoleh dukungan dari para nasabah maupun masyarakat luas. Reputasi itu dapat didasarkan pada identitas dan citra lembaga tersebut.
2. *Islamicity performance index* (IPI) menjadi salah satu cara agar dapat membangun reputasi yang baik terhadap lembaga keuangan syariah dengan beberapa indeks yang digunakan yakni profit sharing ratio (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), *Directors-Employee Welfare Ratio* (DEWR), *Islamic Income Ratio* (IICR) dan *Islamic Investment Ratio* (IIVR).

F. SARAN

1. Reputasi perusahaan tidak bisa terbentuk dalam waktu singkat, sehingga ia perlu dibangun sejak perusahaan tersebut berdiri. Sama seperti lembaga keuangan syariah yang perlu ada budaya yang baik agar reputasinya terbentuk sejak awal
2. Dari semua indeks yang ada terkadang belum kesemuanya bisa digunakan untuk mengukur reputasi lembaga keuangan syariah. Maka perlu melibatkan para *stake holders* agar seluruh indeks bisa dijadikan sebagai acuan dalam membentuk reputasi Perusahaan pada lembaga keuangan syariah melalui *Islamicity performance index* (IPI).

Daftar Pustaka

- Alessandri, Westcott. "Modeling corporate identity: a concept explication and theoretical explanation", *Corporate Communication: An International Journal*, Vol. 6, (2001): 173
- Alessandri, Westcott. "*Corporate Communication: An International Journal*, 182
- Badri, RE. "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Menggunakan *Islamicity Performance Index* Tahun 2015-2017", *Jurnal Ekuivalensi* Vol. 5 No. 1 (2019): 44
- Dowling G. R. "Defining and Measuring Corporate Reputations", *European Management Review. The Journal of The European Academy of Management*, Vol. 13. No. 3 (2016): 207 - 223
- Fahmiyah. "Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan *Islamicity Performance Index* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* : Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2015", *e-Jurnal Pustaka Akuntansi* (2016): 79

- Hameed, S., A. Wirman, B. Alrazi, M. Nazli dan S. Pramono, “*Alternative Disclosure and Performance Measure for Islamic Bank*”. Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age. Saudi Arabia: Dahrn, 2004. 25.
- Nurrohmah, R. F., & Purbayati, R. “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”, *MAPS: Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*, Vol 3 No. 2 (2020): 140–153
- Rafsanjani, H. “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)”, *MASHARIF AL-SYARIAH: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No 1 (2022) : 267-278.
- Raja Ria Yusnita. ”Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity PerformanceIndex Periode Tahun 2012-2016”, *TABARRU’: Jurnal Islamic Banking and Finance* Volume 2. No 1 (2019): 125-146
- Trimanah. “Reputasi dalam Kerangka Kerja Public Relations”, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Vol. 3, No. 1 (Februari-Juli 2012): 8
- Wibisono, Y. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015. 10
- Widiastuti. “Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah 2011-2015”. *AGREGAT : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 1 (2017): 85